



**DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM
INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
STUDI KASUS: EVALUASI KEBIJAKAN TERHADAP EKSPLOITASI IKAN
TUNA DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Syntia Devi Larasati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is one of the economic cooperation agreed by Indonesia and Japan, regulating about tariff reduction. The study reveals that the economic cooperation conducted by both countries has certain implications for efforts in doing environmental reforms in Indonesia especially in the case of tuna exploitation where these implications are believed to be able impact the relationship between Indonesia and Japan. This research is aimed to evaluate said impact on the environment as well to take a closer look at the IJEPA bilateral relations of both countries. The results of this research indicate that the strategy of Indonesia's performance in such cooperation is moderately weak.

Keywords: *IJEPA, exploitation of tuna, Indonesia's foreign policy*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dengan kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Hasil dari kekayaan alam tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara guna pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengelolaan yang baik dan benar secara internal maupun eksternal dengan bekerja sama dengan negara lain.

Jepang merupakan salah satu negara yang tertarik dengan sumber daya alam laut yang ada di Indonesia, terutama ikan tuna. Oleh karena kebutuhan Jepang akan impor sumber daya perikanan dari Indonesia, tahun 2007 lalu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dalam kerangka kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang mulai berlaku efektif di tahun 2008. Dimana kerjasama ini sekiranya dapat menguntungkan di kedua belah pihak, yaitu Jepang terpenuhi kebutuhan akan ikan tunanya dan Indonesia pun dapat menunjang pertumbuhannya dari hasil impor ikan tuna ke Jepang.

Namun, ternyata kerjasama ini telah memunculkan adanya isu *overfishing*. Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat

menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan (www.indonesia.com). Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah Bagaimana hasil evaluasi penerapan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) di bidang perikanan bila dilihat dari perspektif *greentheory*? Dan Bagaimana dampak evaluasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap dinamika hubungan Indonesia dan Jepang? Tujuannya adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terkait eksploitasi ikan tuna di wilayah perairan Indonesia dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Jepang.

Sehubungan dengan hal ini, teori yang digunakan adalah teori *greenpolitics*, yakni salah satu teori hubungan internasional yang membicarakan mengenai hubungan ekonomi, politik, dan social suatu negara yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Teori ini juga didukung oleh teori kerjasama yakni teori yang mengemukakan alasan adanya kerjasama dan teori kebijakan yang akan berkontribusi dalam mengevaluasi kebijakan IJEPA melalui 4 indikator, yaitu waktu, selisih dampak aktual dengan yang diharapkan, tingkat agregasi dampak, dan tipe dampak. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Dimana penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, surat kabar, dan internet. Kemudian akan dilakukan analisis kualitatif terhadap data-data yang diperoleh.

2. Pembahasan

Implementasi IJEPA di bidang perikanan khususnya untuk komoditas ikan tuna, awalnya ditandai dengan penurunan tarif bea masuk ke Jepang, yaitu sebesar 3.5% untuk ikan tuna segar dan 9,5% untuk ikan tuna kaleng. Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor perikanan. Hal ini terbukti pada volume dan nilai produksi ikan tuna yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 1.1). Peningkatan ini di iringi pula dengan peningkatan volume ekspor ikan tuna Indonesia ke beberapa negara tujuan utama, seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Cina (Tabel 1.2).

Tabel 1.1 Volume dan Nilai Produksi Komoditas Tuna Indonesia (2008-2013)

Rincian	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Volume (ton)	194.173	203.269	213.796	241.364	275.779	305.435
Nilai (Rp 1.000)	2.489.114.570	2.697.199.937	3.428.078.393	3.569.440.117	5.090.806.971	6.691.463.095

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap KKP lihat www.statistik.kkp.go.id, 2012: 69 dan 78, data diolah oleh peneliti).

Tabel 1.2 Volume Ekspor Komoditas Ikan Tuna Indonesia ke Negara Tujuan Utama (2008-2013)

Negara	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jepang	28.932	32.633	39.743	44.604	38.526	42.770
AS	17.624	19.682	20.013	15.062	14.545	18.549
Eropa	11.852	14.426	12.763	30.134	27.803	41.594
Cina	6.762	4.032	1.010	711	6.640	3.156

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap KKP lihat www.statistik.kkp.go.id, 2012 dan 2013: 173 dan 185, data diolah oleh peneliti).

2.1. Evaluasi Kebijakan IJEP

2.1.1. Waktu

Berdasarkan indikator waktu, yang mana dimensi ini dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, maka perlu adanya pengawasan ataupun evaluasi terhadap kebijakan IJEP ini agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lima tahun sudah kebijakan ini berjalan dan sudah selayaknya dilakukan evaluasi secara keseluruhan atas dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari kebijakan IJEP ditunjukkan dengan peningkatan volume dan nilai produksi ikan tuna dari tahun ketahun yang dapat dilihat dalam tabel 1.1. Selain itu, dampak positif dari adanya kebijakan ini adalah penurunan tarif, baik bagi Indonesia maupun Jepang. Dalam kurun waktu yang bisa dikatakan sebentar, kebijakan ini juga sudah menimbulkan dampak adanya tanda-tanda eksploitasi terhadap komoditas ikan tuna dan jika kebijakan ini diteruskan maka di masa yang akan datang, tidak hanya bagi Indonesia dan Jepang, negara-negara yang ada di dunia pun akan kehabisan stok ikan tuna.

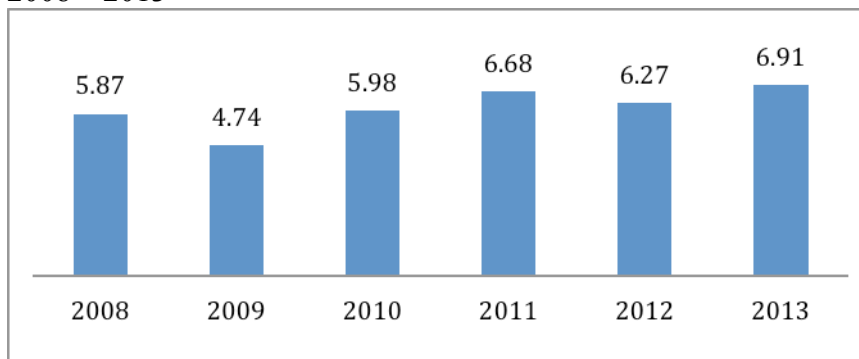
2.2.2. Selisih Dampak Aktual dengan yang Diharapkan

Pencapaian tujuan dari perdagangan komoditas ikan tuna ini adalah peningkatan volume produksi komoditas tuna dari tahun ketahun dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sehingga akan sulit untuk mengukur selisih dampak aktual dengan dampak yang diharapkan. Berdasarkan data pada tabel 1.1, Indonesia setiap tahunnya berhasil mencapai target untuk meningkatkan volume produksi ikan tuna dari tahun ke tahun. Peningkatan volume produksi ikan tuna ini, jika terus-menerus terjadi tanpa adanya pengawasan yang baik dari pemerintah dapat menimbulkan adanya eksploitasi terhadap komoditas ikan tuna, meskipun hal tersebut menguntungkan bagi Indonesia. Jika negara hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata tanpa memikirkan lingkungan maka akan terjadi ketidakseimbangan ekologi.

2.2.3. Tingkat Agregasi Dampak

Berdasarkan indikator tingkat agregasi dampak yang ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan ini juga menjangar pada kehidupan masyarakat, terutama nelayan. Seharusnya, seiring dengan meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan yang dihasilkan maka kesejahteraan nelayan pun diharapkan juga meningkat, akan tetapi tetap saja nelayan miskin masih mendominasi dalam indeks jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Hal ini sangat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh Indonesia di bidang ekonomi (Gambar 1.1).

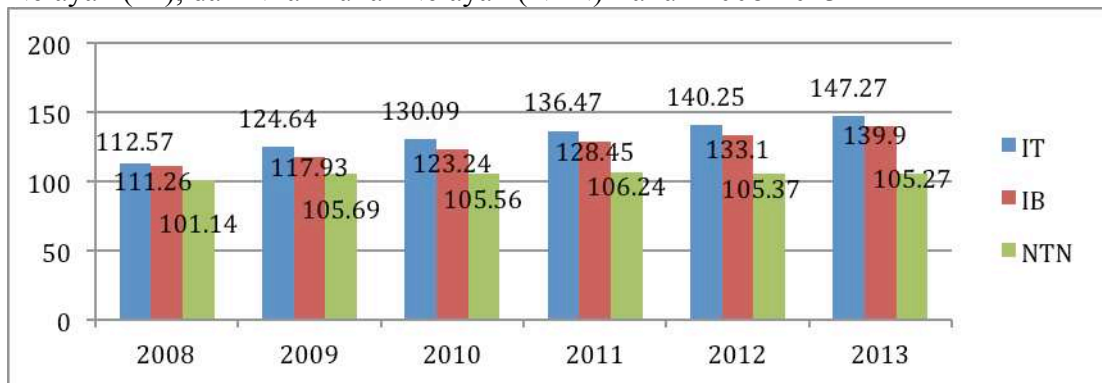
Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dalam PDB Nasional 2008 – 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik, lihat www.bps.go.id, data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data di atas, persentase PDB sektor perikanan dalam PDB nasional relatif meningkat. Namun, anggaran untuk kesejahteraan nelayan sangat minim. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh nilai tukar nelayan (NTN) yang meningkat secara perlahan, dan justru kini mulai turun secara perlahan pula (Gambar 1.2).

Gambar 1.2 Indeks Harga yang Diterima Nelayan (IT), Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (IB), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2008-2013



Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap KKP lihat www.statistik.kkp.go.id, 2013 dan 2014, data diolah oleh peneliti).

Berdasarkan data di atas, indeks harga yang diterima oleh nelayan semakin meningkat. Hal tersebut menggambarkan nilai produksi yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga pendapatan semakin meningkat. Namun, seiring dengan meningkatnya indeks harga yang diterima oleh nelayan, maka indeks harga yang dibayarkan oleh petani semakin meningkat pula dikarenakan biaya produksi dan penambahan barang modal, serta konsumsi rumah tangga juga meningkat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, ketika indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih rendah daripada indeks harga yang dibayar oleh nelayan, karena melalui data di atas, sangat tipis sekali perbedaan antara kedua indeks yang bersangkutan.

2.2.4. Tipe Dampak

Dari segi ekonomis, kebijakan IJEPA menjalar pada masalah kesejahteraan nelayan yang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan demi usaha pemerintah menyejahterakan rakyat dan demi mengangkat derajat nelayan itu sendiri. Dari segi non ekonomis, saat ini masyarakat Indonesia maupun kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan keseimbangan ekologi terlihat mulai peduli dengan kinerja pemerintah dalam rangka mengelola wilayah perairan Indonesia. Seperti

misalnya kelompok – kelompok yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), *Greenpeace*, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dan masih banyak lagi. Bahkan Indonesia sendiri juga telah memiliki badan atau lembaga yang dapat menjembatani para masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, dan akademisi untuk melakukan penelitian di wilayah perairan, seperti *Ecosystem Approach Fisheries Management Indonesia (EAFM-Indonesia)*, *Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring (SEACORM)*, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI. Penelitian yang dilakukan dapat berupa biologi, fisika, dan kimia perairan.

2.2.5. Greenpolitics

Perspektif *greenpolitics* sebagai perspektif yang mengatur hubungan antar bangsa yang berkaitan dengan lingkungan sebagai isu utama ini menjelaskan bahwa krisis atau kerusakan lingkungan merupakan akibat dari adanya struktur normatif seperti, ekonomi, politik dan social (Paterson 2005: 236). Dengan kata lain, eksploitasi ikan tuna yang terjadi di perairan Indonesia merupakan akibat dari adanya struktur normatif yang berlaku dalam hal ini adalah kebijakan IJEPA, dengan Indonesia dan Jepang sebagai aktor yang merumuskan kebijakan ini. Dimana di dalam IJEPA mengatur segala bentuk mekanisme kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dengan berlakunya IJEPA, maka akan ada yang dinamakan batasan pertumbuhan. Seperti yang diketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya memiliki tingkat keterbatasan. Oleh karena itu, perspektif *greenpolitics* menolak anggapan antroposentris yang menganggap bahwa manusia bisa memanfaatkan lingkungan secara berlebihan asalkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dengan argumen ekosentris yang menganggap bahwa lingkungan itu harus dilestarikan.

Jika dilihat dalam penjelasan di atas, kebijakan IJEPA hanya dijadikan sebagai sebuah kamufase ataupun formalitas belaka. Hal ini dikarenakan didalam IJEPA itu sendiri telah terdapat butir-butir pelestarian lingkungan, bisa diartikan bahwa kedua negara telah melakukan tindakan preventif guna menghindari adanya eksploitasi ikan tuna. Pemikiran itulah yang kemudian menggiring masyarakat bahwa kedua negara peduli akan lingkungan dan tidak akan terjadi hal seperti eksploitasi ikan tuna. Namun, kenyataannya eksploitasi itu tetap terjadi karena kembali lagi pada kepentingan masing-masing negara yang mana selama ini diketahui bahwa kerjasama tidak lepas dari yang namanya kepentingan.

Dalam hal ini, kepentingan nasional Jepang di dalam IJEPA, antara lain adalah meningkatkan akses pasar dengan memanfaatkan kebijakan penurunan tarif melalui IJEPA, mengamankan investasi yang ditanamkan di Indonesia, dan yang paling penting adalah memperkokoh diri sebagai negara yang dapat memimpin negara-negara Asia di bidang perekonomian. Sedangkan Indonesia, selain untuk meningkatkan akses pasarnya, Indonesia juga menginginkan Jepang untuk terus berinvestasi di Indonesia, dan yang paling penting adalah mencoba menyetarakan Indonesia dengan negara-negara lain yang telah bekerja sama dengan Jepang dalam kerangka *free trade area* serta menyokong Indonesia dalam keamanan ekonominya.

Kritik *greenpolitics* terhadap sikap Indonesia dan Jepang mengenai pengimplementasian IJEPA dan dampaknya, diakibatkan oleh:

- a. Kebijakan IJEPA seharusnya tidak hanya membahas ekspor, impor, investasi, dan penurunan tarif antar kedua negara, tetapi juga membahas bagaimana menjalankan *green economics*. Dimana dalam pelaksanaan kebijakan ini

- antara lingkup lingkungan dan ekonomi bisa berjalan beriringan agar tidak terjadi ketimpangan seperti krisis sumber daya alam.
- b. Proses pembuatan kebijakan yang relatif singkat, sehingga menimbulkan ketergesa-gesaan antar kedua belah pihak dan tidak memikirkan strategi yang matang dalam pembuatan kebijakan IJEPA. Misalnya dalam hal menentukan model pengelolaan perikanan. Model pengelolaan perikanan yang sering dipakai pada zaman sekarang adalah model pengelolaan konvensional yang telah berkembang mengikuti perkembangan. Model konvensional ini, tadinya dianggap sebagai model yang cocok untuk mengelola perikanan tetapi ternyata tidak. Hal ini dikarenakan ekosistem alam tidak dapat diprediksi.
 - c. Kebijakan IJEPA merupakan kebijakan ekonomi yang dapat menyangkut berbagai macam produk yang memiliki nilai jual. Akan tetapi, selama proses perundingan pembuatan kebijakan ini, dari pihak Indonesia diwakili oleh Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan beserta KADIN. Meskipun hasil perundingan akan dirundingkan kembali pada pihak kementerian yang lain terkait komoditas yang akan diperjual belikan, namun sangat disayangkan jika tidak ada seorang pun dari masing-masing kementerian yang mewakili dalam JSG yang dilakukan oleh Jepang dan Indonesia, sehingga terjadi ketimpangan untuk beberapa komoditas tertentu.
 - d. Indonesia dan Jepang seharusnya tidak menjadikan kebijakan IJEPA ini sebagai formalitas belaka dikarenakan semua aspek telah tercantum di dalamnya. Namun, harus ada langkah konkret terhadap apa yang kedua belah pihak rumuskan dalam kebijakan tersebut.
 - e. Posisi tawar kedua negara yang tidak berimbang, yang mana Indonesia merupakan negara berkembang dan Jepang adalah negara maju. Posisi tawar negara berkembang cenderung lemah dibandingkan negara maju, jika Indonesia tidak berhati-hati maka akan merugikan bagi Indonesia sendiri.

2.2. Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam IJEPA

Eksplorasi ikan tuna merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari berlakunya kerjasama IJEPA. Namun, masih ada beberapa masalah lain yang mendorong agar kebijakan ini segera di evaluasi. Masalah-masalah tersebut antara lain mengenai timpangnya perdagangan antara Indonesia dan Jepang, standarisasi produk barang atau jasa yang masuk ke Jepang cukup sulit, terjadinya krisis di berbagai bidang, dan jadwal penurunan tarif yang tidak tepat waktu. Yang mana masalah-masalah ini kemudian berdampak pada dinamika hubungan antara Indonesia dan Jepang. Namun, dinamika antar kedua negara ini tidak begitu signifikan dikarenakan politik luar negeri pada saat itu, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu *million friends zero enemy* cenderung lemah. *Soft diplomacy* yang ditawarkan oleh Indonesia mengandalkan kekuatan ide, kekuatan nilai luhur bangsa/negara, dan kekuatan pencapaian positif yang diperoleh oleh negara (Nye, 2004: 11 dalam “Soft Power dan Strategi Diplomasi Indonesia” oleh Pribadi Sutiono).

Ecological modernization yang ditawarkan oleh perspektif *green politics* dapat menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi dan politik yang dilakukannya dengan Jepang. Model ini memiliki dua versi, yaitu *weak ecological modernization* dan *strong ecological modernization*. Kedua versi ini memiliki karakteristik yang berbeda (Christoff, 1996: 490).

Weak Ecological Modernization	Strong Ecological Modernization
Technological solutions to environmental problems	Broad changes to institutional and economic structure of society incorporating ecological concerns
Technocratic/corporatism styles of policy making by scientific, economic and political elites	Open, democratic decision making with participation and involvement
Restricted to developed nations who use ecological modernisation to consolidate their global economic advantages	Concerned with the international dimensions of the environment and development
Imposes a single, closed-end framework on political and economic development	A more open-ended approach with no single view, but multiple possibilities with ecological modernisation providing orientation

Bila dilihat melalui kedua karakteristik di atas, Indonesia tergolong pada *strong ecological modernization*. Dimana Indonesia berusaha melibatkan publik dan kontrol demokratis dalam perkembangan ekonomi dan politiknya. Berbeda dengan Jepang yang bisa dikatakan berada pada posisi tengah antara kedua karakteristik tersebut, namun cenderung tergolong *weak ecological modernisation*. Hal ini dikarenakan Jepang mengedepankan solusi teknologi untuk masalah lingkungan, melibatkan negara-negara maju, tetapi juga melibatkan pengawasan publik mengingat Jepang juga termasuk negara demokrasi.

Pada posisi Indonesia yang tergolong *strong ecological modernization* inilah yang membuat Indonesia dimanfaatkan oleh Jepang. Dengan terbukanya pasar bebas antar kedua negara, tentu saja pertukaran teknologi juga akan semakin mudah. Hal ini menjadi ketertarikan sendiri bagi Indonesia mengingat teknologi Indonesia yang tidak begitu maju. Indonesia juga memiliki pandangan terbuka terhadap segala kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik sesuai dengan slogan politik luar negeri Indonesia saat itu. Selain itu, Jepang dapat memanfaatkan Indonesia untuk terus menjaga lingkungan dengan memberikan sumbangan dana dan teknologi, dan di sisi lain Jepang bisa tidak terlalu peduli dengan lingkungan karena merasa sudah mengeluarkan dana untuk menjaga lingkungan. Seperti fenomena saat ini negara maju memberikan dana kepada negara berkembang untuk kepentingan keamanan lingkungan tetapi mereka sendiri tidak mau mengurus lingkungannya.

Ternyata iming-iming keuntungan dana dan kemajuan teknologi membuat Indonesia terbuai. Pemerintah Indonesia masih terpaku pada pemikiran bahwa dengan uang dan teknologi yang canggih segala permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya alam dapat diselesaikan. Hal tersebut bertentangan dengan konsep *ecological modernization*, yang secara tidak langsung mengkritisi bahwasanya bisa saja perkembangan teknologi justru yang membuat kerusakan lingkungan dan kerjasama ekonomi berkontribusi pada reformasi lingkungan. Walaupun Indonesia sebenarnya juga sudah menerapkan konsep *green* pada tatanan negaranya, seperti Indonesia merupakan negara demokrasi, melakukan desentralisasi, dan fokus terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Posisi Indonesia yang sebenarnya dalam pandangan *green politics* sudah cukup kuat untuk menjalankan *green political economy* menjadi diragukan karena berbenturan dengan slogan politik luar negeri *million friends zero enemy*. Bisa jadi sebenarnya hal tersebut tidak berbenturan, hanya saja pemerintah Indonesia yang kurang bisa menempatkan bagaimana slogan tersebut dapat di implementasikan.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa *soft diplomacy* yang ditawarkan oleh Indonesia mengangkat kekuatan ide, kekuatan nilai luhur bangsa/negara, dan kekuatan pencapaian positif yang diperoleh oleh negara (Nye, 2004: 11 dalam “Soft Power dan Strategi Diplomasi Indonesia” oleh Pribadi Sutiono). Hal tersebut sebenarnya sudah sangat cocok dalam membangun *green political economy*, akan tetapi, selain pemerintah yang kurang bisa menempatkan bagaimana slogan politik luar negerinya di implementasikan, ternyata *soft diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar sangat lemah.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan IJEPa merupakan kebijakan yang terbentuk dalam waktu yang relatif singkat, dicanangkan tahun 2004, mulai dirundingkan tahun 2005, dan di implementasikan tahun 2008. Sehingga bisa jadi hal-hal yang dirumuskan di dalamnya belum matang dipertimbangkan sebelumnya. Seperti halnya tentang pelestarian lingkungan, yang sebenarnya tercantum dalam kebijakan tersebut, justru hanya menjadi formalitas agar menggiring opini publik bahwa kedua negara peduli akan lingkungan. Namun, kenyataannya terjadi krisis dimana-mana. Hal ini didukung pula oleh keegoisan masing-masing negara untuk mencapai kepentingan negaranya, seperti meningkatkan akses pasar, mengamankan ataupun menumbuhkan investasi, dan memperkokoh kekuatan ekonomi negara sendiri.

Kepentingan-kepentingan ini akhirnya menimbulkan dampak lain bagi para nelayan Indonesia. Nelayan Indonesia masih banyak yang belum sejahtera, padahal melalui kebijakan IJEPa, Indonesia telah banyak mengirimkan sumber daya perikanannya ke Jepang dan mendapat keuntungan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara. Selain masalah kepentingan, Indonesia juga tidak memiliki target pencapaian yang jelas sehingga eksploitasi tetap berjalan.

Masalah-masalah yang timbul akibat pengimplementasian IJEPa membuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang sedikit naik turun. Namun, fluktuasi hubungan antara kedua negara dapat di atasi karena Indonesia menekankan *soft diplomacy* dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam IJEPa. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam memainkan perannya dalam kerjasama ini. Kondisi tersebut membuat Indonesia dimanfaatkan oleh Jepang. Padahal menurut perspektif *greenpolitics*, Indonesia telah memiliki kekuatannya sendiri dalam hal *ecological modernization* dibandingkan dengan Jepang.

Daftar Pustaka

Buku

- Dobson, Hugo. 2001. *Japan's International Relations*. New York: Routledge.
- Holsti, K.J.. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Langbein, Laura I.. 1980. *Discovering Whether Programs Work: A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation*. Santa Monica: Goodyear Publishing.
- Paterson, Matthew. 2001. *Green Political* dalam Scoot Burchill & Andrew Linklater, *International Relations Theory 3rdEd*. New York: St. Martin's Press. Inc.

Laporan

Statistik Indonesia 2011. 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Statistik Indonesia 2014. 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Statistik Kelautan dan Perikanan 2013. 2014. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Internet

_____. *55 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang: What I have Learned From Japan*. 2013. Dalam <http://www.bppt.go.id/index.php/opini/daftar-opini/1843-55-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-dan-jepang-what-i-have-learned-from-japan> diakses pada tanggal 28 November 2014.

_____. *Hampir Semua Perairan Indonesia Alami "Overfishing"*. 2013. Dalam <http://www.endonesia.com/2013/09/hampir-semua-perairan-indonesia-alami.html> diakses pada 14 Maret 2014.

_____. *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*. 2005. Dalam <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf> diunduh pada tanggal 13 Desember 2014.

_____. *Kesejahteraan Nelayan Dinilai Terbaik*. 2014. Dalam <http://www.kiara.or.id/kesejahteraan-nelayan-dinilai-terbaik/> diakses pada tanggal 3 Januari 2015.

Mol, Arthur P.J., Daniel A. Sonnenfeld. 2000. *Ecological Modernization Around the World: An Introduction* dalam *Environmental Politics* Vol 9. Dalam [http://dtserv3.compsy.unijena.de/ws2013/aiwsoz_uj/69512762/content.nsf/Pages/647735B25BCFB91EC1257C0E005BFC88/\\$FILE/Mol,%20Arthur%20and%20David%20Sonnenfeld_Ecological%20Modernization%20Around%20the%20World%20An%20Introduction.pdf](http://dtserv3.compsy.unijena.de/ws2013/aiwsoz_uj/69512762/content.nsf/Pages/647735B25BCFB91EC1257C0E005BFC88/$FILE/Mol,%20Arthur%20and%20David%20Sonnenfeld_Ecological%20Modernization%20Around%20the%20World%20An%20Introduction.pdf) diunduh pada tanggal 14 April 2015.

Sutiono, Pribadi. 2012. *Soft Power dan Strategi Diplomasi Indonesia*. Dalam *Jurnal Diplomasi* Vol.4 No.1, Maret 2012. Dalam <http://www.kemlu.go.id/Tabloids/Jurnal%20Diplomasi%20Maret%202012.pdf> diunduh pada tanggal 27 Maret 2015.